



2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

KABUPATEN NIAS SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nias Selatan, serta rencana kerja dan pendanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Perindustrian, urusan Perdagangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua.

Telukdalam, 31 Juli 2023
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan

F. Martin Ley, SE.,MM
Pembina Tk I
NIP.19750316 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN 1	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...7	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahu Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah12 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
4.1 Program dan Kegiatan.....	36
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditunjang dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
2. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja PD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program / kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada Rancangan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan Prioritas daerah atau prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai

fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD yang dilanjutkan dengan RENJA PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah PD. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan membuat RENJA yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nias Selatan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias Selatan

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5-57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
17. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 5.1_48 tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD KabupTen Nias Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan di tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dengan berdasarkan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
- 2) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASUL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022 telah terlaksana sesuai dengan dokumen rencana kerja perubahan tahun 2022. Faktor pendukung keberhasilan realisasi dari seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 yaitu adanya koordinasi dan komunikasi di semua lini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan untuk memberhasilkan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Implikasi terhadap capaian realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 yaitu pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat terlaksana dengan baik, pemantauan harga kebutuhan pokok dapat terlaksana sehingga harga kebutuhan pokok dapat diawasi serta memudahkan Pejabat Pengambil keputusan untuk memberikan kebijakan dalam stabilisasi harga.

Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel T-C. 29

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Kabupaten pada tahun 2022-2026 (Selama 5 Tahun)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2022)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3					URUSAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	- %	100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
3	30	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 Dok	- Dok	8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	16 Dok	40%
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%

3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dok	- Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	6 Dok	40%
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	25 Lap	Lap	19 Lap	19 Lap	100%	5 Lap	24 Lap	96%
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Org / Bln	- Org/Bln	14 Org / Bln	14 Org / Bln	100%	14 Org / Bln	28 Org / Bln	40%
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	- Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25 Lap	- Lap	18 Lap	18 Lap	100%	4 Lap	22 Lap	88%
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	- %	100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	- Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	40%
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	- Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	40%
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lap	- Paket	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	24 Lap	40%
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	37 Unit	- %	4 Unit	4 Unit	100%	6 Unit	10 Unit	27%
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	- Unit	4 Unit	4 Unit	100%	5 Unit	9 Unit	45%
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100 %	- %	100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7500 Lap	- Lap	1000 Lap	1000 Lap	100%	1500 Lap	2500 Lap	33%

3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Lap	- Lap	8 Lap	8 Lap	100%	9 Lap	17 Lap	38%
3	30	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	25 Unit	- Unit	1 Unit	1 Unit	100%	17 Unit	18 Unit	72%
	30	01	2.09	02	Peneydiaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	- Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40%
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	75 %	- %	75 %	75 %	100%	75 %	30 %	40%
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga,dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Adanya Pengendalian Harga,dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	205 Lap	- Lap	30 Lap	30 Lap	100%	41 Lap	71 Lap	35%
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	150 Lap	- Lap	30 Lap	30 Lap	100%	30 Lap	60 Lap	40%
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan	100 %	- %	100 %	100 %	100%	100 %	20 %	20%
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	20 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	4 Dok	5 Dok	25%
3	31	02	2'01	05	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tercantum dalam Tabel T-C 30 berikut ini.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Lakip	-	-	CC	B	B	B	-	-	A	A	
2	Persentase dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Persentase kinerja ralisasi pupuk subsidi	-	√	75%	75%	80%	85%	77,18%	-	78%	80%	
4	Persentase Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan antara lain :

3. Pemulihan ekonomi dari berbagai sektor dampak covid-19
4. Belum adanya produk-produk unggulan yang bisa diekspor di luar daerah
5. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam membina pelaku usaha orientasi ekspor
6. Sarana prasarana pasar yang masih perlu perbaikan menuju pasar sehat dan modern
7. Turunnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar rakyat semenjak adanya pasar pasar Modern yang ada di sekitar kota kabupaten
8. Pasca berlakunya sistem OSS pada perizinan menurunkan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus rekomendasi / komitmen ke Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk baru atau perpanjangan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan bidang perdagangan.
9. Belum maksimalnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Setelah menelaah beberapa permasalahan dan dalam rangka mendorong pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, Serta Capaian Program maka dirumuskan beberapa isu – isu penting / strategis yang akan di tindak lanjuti dalam perumusan Program

Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yaitu :

1. Masih banyak terdapat pasar yang kurang layak dan sehat dari segi fisik maupun sarana dan prasarana nya menuju pasar sehat dan modern
2. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pedagang di wilayah pasar yang dikelola pemerintah
4. Rendahnya daya saing produk lokal dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk serta kemasan
5. Kurangnya pengawasan terhadap perizinan toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang sesuai aturan
6. Peningkatan Komoditi ekspor produk unggulan daerah Kabupaten Nias Selatan
7. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam Daerah maupun luar Daerah
8. Penataan toko modern
9. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)) dengan UPT Kemetrolagian
10. Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk penyaluran pupuk bersubsidi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Nias Selatan. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 beberapa program yang tidak terakomidir dikarenakan penyesuaian anggaran yang tersedia. Untuk kondisi anggaran tahun 2024 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C 31 dibawah ini

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nisel	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	1.821.465	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nisel	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	675.000	Program Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	45.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	45.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin

3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	5 Lap	785.526	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang	5 Lap	66.500	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nisel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bl n	770.526	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nisel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Org/Bl n	54.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	7.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	3 Lap	30.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Nisel	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat	1 Lap	7.500	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	10.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Lap	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Lap	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	25 Org	82.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nisel	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	28 Org	45.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nisel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	25 Unit	27.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nisel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nisel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	25 Paket	27.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nisel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	28 Paket	30.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nisel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Org	27.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nisel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 org	15.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin

3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nisel	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	%	380.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nisel	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum	100 %	359.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10 Paket	15.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nisel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 Paket	7.500	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nisel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	10 Paket	50.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nisel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	2 Paket	64.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nisel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nisel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nisel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nisel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nisel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	15.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nisel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	12 Dok	10.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nisel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Lap	200.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	15.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nisel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dok	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Nisel	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Unit	195.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Nisel	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2 Unit	20.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5 Unit	150.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nisel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Nisel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	- Unit	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin

3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	191.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	88.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lap	15.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Lap	10.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	2.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Lap	-	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Lap	174.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nisel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Lap	78.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	17 Unit	111.939	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nisel	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	1 Unit	44.000	Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	43.762	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nisel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Unit	0	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nisel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.177	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nisel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.000	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nisel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	0	Sub Kegiatan Bersifat Rutin
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				775.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				175.000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	45 %	100.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	45 %	40.000	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha	Nisel	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Dok	25.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha	Nisel	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	30 Dok	20.000	Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nisel	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35 Dok	25.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Nisel	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30 Dok	20.000	Sub Kegiatan Penunjang Program

3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Nisel	Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan kepada Pengecer / Penjual	35 Dok	25.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Nisel	Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan kepada Pengecer / Penjual	- Dok	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Nisel	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35 Dok	25.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Nisel	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	Lap	50.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	15 Lap	20.000	Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	35 Lap	25.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Nisel	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	15 Lap	10.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	35 Dok	25.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	15 Dok	10.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nisel	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	80 %	300.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nisel	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	80 %	-	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat	7 Unit	250.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Tersedianya sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat	- Unit	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	200.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	- Unit	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	50.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Unit	-	Sub Kegiatan Penunjang Program

3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nisel	Terkelolanya sarana distribusi perdagangan dengan baik	dok	50.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nisel	Terkelolanya sarana distribusi perdagangan dengan baik	- Dok	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dok	25.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dok	25.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nisel	Persentase Kinerja realisasi pupuk	80 %	300.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Nisel	Persentase Kinerja realisasi pupuk	80 %	135.000	Program Prioritas Daerah
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	Lap	75.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nisel	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	30 Lap	30.000	Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30 Lap	25.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Lap	10.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30 Lap	25.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Lap	10.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30 Lap	25.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Nisel	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Lap	10.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Lap	115.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	11 Lap	90.000	Kegiatan Prioritas Daerah

3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Lap	40.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Lap	20.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30 Lap	40.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Nisel	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Lap	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	35.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	70.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	Lap	110.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nisel	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	10 Lap	15.000	Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Nisel	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	40 Dok	25.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Nisel	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	- Dok	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5 Lap	35.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	- Lap	-	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	25 Lap	50.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nisel	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 Lap	15.000	Sub Kegiatan Prioritas Daerah
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	80 %	75.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	- %	-	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nisel	Adanya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Dok	75.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nisel	Adanya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	0 Dok	-	Kegiatan Penunjang Program
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Nisel	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Dok	75.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Nisel	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	- Dok	-	Kegiatan Penunjang Program

3	31				URUSAN PEMERINTAHAN RIDANG BERINDUSTRIAN				225.000	URUSAN PEMERINTAHAN RIDANG BERINDUSTRIAN				150.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nisel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang Terselesaikan	100 %	125.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nisel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang	100 %	75.000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Dok	125.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Terlaksananya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	2 Dok	75.000	Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	50.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nisel	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	25.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	25.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	25.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	50.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	25.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Nisel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50 %	25.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Nisel	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	- %	-	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersedianya Penerbitan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Dok	25.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersedianya Penerbitan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Dok	-	Kegiatan Penunjang Program
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dok	25.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi	- Dok	-	Sub Kegiatan Penunjang Program

3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nisel	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	100 %	75.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nisel	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	100 %	75.000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dok	75.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nisel	Tersusunnya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	3 Dok	75.000	Kegiatan Penunjang Program
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	25.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	1 Dok	25.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dok	25.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dok	25.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dok	25.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Nisel	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dok	25.000	Sub Kegiatan Penunjang Program
					Jumlah				2.821.465	Jumlah				1.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. Pada Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan melalui Musrenbang maupun dari Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik- tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Kebijakan nasional terkait pembangunan industri dan perdagangan dapat dilihat pada Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.

Menurut Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, terdapat beberapa arah kebijakan dan strategi pembangunan industri. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

AGENDA 1

Arah Kebijakan:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

A. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 2.5.1 Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- 2.5.2 Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- 2.5.3 Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- 2.5.4 Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan
- 2.5.5 Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

B. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1. Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;

2. Meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 3. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
 4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 5. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 6. Mengembangkan industri halal
- C. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
1. Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 2. Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 3. Mengelola impor;
 4. Meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 5. Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 6. Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan
 7. Meningkatkan efektivitas preferential trade agreement (PTA)/free trade agreement (FTA)/comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- D. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
1. Meningkatkan pendalaman sektor keuangan;
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri
 3. Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
 4. Meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata;
 5. Reformasi fiskal; dan

6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital

AGENDA 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

A. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:

1. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/ regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual tvet system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan

guru/instruktur di industri; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;

4. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
5. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian izin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/ pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/ teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan komite vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan kartu pra- kerja.
6. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup:
7. Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
8. Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
9. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
10. Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;

11. Pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
12. Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university; dan
13. Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (pts) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategis tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam rencana kerja pada tahun 2024 akan mengambil peran dalam mendukung arah kebijakan pada agenda 3 (tiga) yaitu dalam hal meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Menurut Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, terdapat beberapa arah kebijakan dan strategi. Arah Kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

Pengimplementasian ketiga strategi di atas dilakukan antara lain melalui:

1. Upaya peningkatan promosi ekspor non-migas dan jasa;
 2. Peningkatan pencitraan dan standar produk Indonesia;
 3. Peningkatan promosi ekspor dan misi dagang;
 4. Optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri dan export center di dalam negeri;
 5. Peningkatan pelayanan dan pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor;
 6. Pengamanan perdagangan untuk penyelesaian ekspor; dan
 7. Pengelolaan impor untuk mendukung ekspor.
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- b. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA);

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. Percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional;
 2. Peningkatan PTA/FTA/CEPA yang disepakati;
 3. Penyelarasan regulasi dengan hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional; dan
 4. Peningkatan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan penguatan jaringan distribusi untuk barang kebutuhan pokok, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan
- b. Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. optimalisasi pemanfaatan pasar dan gudang;
2. optimalisasi pemanfaatan gerai maritim dan tol laut;
3. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Perdagangan Antar Provinsi; dan
4. pembinaan dan pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap bapokting, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
- b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
- c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok;
2. peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok Bersama institusi penegak hukum dan pemerintah daerah;
3. optimalisasi efektivitas pengelolaan impor barang kebutuhan pokok; dan (iv) optimalisasi efektivitas kebijakan pengaturan harga kebutuhan pokok.

5. Peningkatan pemberdayaan konsumen

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan edukasi konsumen; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. Penguatan regulasi pro-konsumen;
2. Peningkatan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal yang berkelanjutan;

3. Penyediaan sarana informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen Peningkatan Tertib Niaga Pelaku Usaha.
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur

Dalam rangka mendukung arah kebijakan peningkatan tertib niaga, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan;
2. Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

- 1). Peningkatan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan;
- 2). Peningkatan pendaftaran barang/jasa sebagai upaya perlindungan konsumen;
- 3). Peningkatan standarisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar;
- 4). Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual;
- 5). Peningkatan pengawasan dan kepastian penegakan hukum.
- 7). Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung kebijakan pengamanan pasar dalam negeri, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

- a) Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; dan
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.

Pengimplementasian strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. peningkatan pelayanan kemudahan berusaha dalam bidang perdagangan dalam negeri yang mudah, murah, cepat dan akurat;

2. peningkatan sinergitas antara pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan;
 3. optimalisasi revitalisasi pasar yang berkualitas, nyaman aman dan bersih;
 4. optimalisasi kegiatan pemasaran produk dalam negeri unggulan yang berkesinambungan;
 5. peningkatan kapasitas pelaku usaha (UMKM) melalui pembinaan dan pelatihan usaha; dan
 6. optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk pasar dan produk dalam negeri.
7. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah optimalisasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK melalui:

1. peningkatan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan Perdagangan Berjangka Komoditi;
 2. peningkatan dukungan legislasi, pengawasan penindakan dan litigasi PBK, SRG dan PLK;
 3. peningkatan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK; dan (iv) xc/SRG dan PLK.
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- Dalam rangka mencapai arah kebijakan penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.
- a. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
 - b. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi;
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;

- d. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
- e. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan;
- f. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima

Dalam rangka mencapai arah kebijakan pelayanan publik yang prima, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut;

- a. Memperkuat pelayanan publik yang responsif; serta
- b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

Dalam rangka mencapai arah kebijakan peningkatan kualitas kebijakan perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas kajian perdagangan; serta
- b. Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan.

12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif;
- b. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi
- c. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif; dan
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategis tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dalam rencana kerja pada tahun 2024 akan mengambil peran dalam mendukung penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi. Pelaksanaan pembangunan subsektor Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Nias Selatan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi.

Dalam rangka mendukung Misi I dan Misi IV Kabupaten Nias Selatan, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan adalah:

1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pelayanan Dinas perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas dan akuntabel;
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.

Tujuan di atas kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Terwujudnya Stabilisasi harga barang di daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta Bidang / Seksi penanggung jawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel T-C 32 di bawah ini:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						1.000.000.000,00							2.228.756.166,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.000.000.000,00							2.228.756.166,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						830.000.000,00							2.078.756.166,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip OPD Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100*Persen B*Nilai/ Predikat			B Nilai/ Predikat 100 Persen	675.000.000,00						100*Persen B*Nilai/ Predikat	1.773.756.166,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	-			8 Dokumen	45.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	-			5 Laporan	66.500.000,00			-	-	-	-	862.579.166,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	54.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		847.579.166,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	-			1 Laporan	7.500.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			28 Orang	45.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	359.000.000,00			-	-	-	-	559.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	64.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-			2 Unit	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	-			100 %	88.000.000,00			-	-	-	-	189.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	78.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	-			1 Unit	44.000.000,00			-	-	-	-	43.177.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	44.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.177.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	75.00*Perse n			45.00 Persen	40.000.000,00						75.00*Perse n	120.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	-			30 Dokumen	20.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				30 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Adanya Pengendalian dan Pengawasan Bahan Berbahaya	-			15 Laporan	20.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				15 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				15 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	75.00*Perse n			80.00 Persen	115.000.000,00						75.00*Perse n	185.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya barang Kebutuhan barang Pokok bagi Masyarakat	-			30 Laporan	30.000.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Adanya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			11 Laporan	70.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten / Kota	-			10 Laporan	15.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				10 Laporan	15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						150.000.000,00							125.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Yang terselesaikan	Ada*			100 Persen	75.000.000,00						Ada*	50.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	75.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri Yang Ter-update	Ada*			100 Persen	75.000.000,00						Ada*	75.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan JPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	75.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						20.000.000,00							25.000.000,00	
1.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja realisasi pupuk	75.00*Perse n			80.00 Persen	20.000.000,00						75.00*Perse n	25.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Adanya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			11 Laporan	20.000.000,00			Memperku a Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualit as dan Berkeadil an	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Meningkatk an Kesejaht eraan Sosial Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								1.000.000.000,00						2.228.756.166,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2024, diharapkan Pencapaian Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja PD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun Ketiga perencanaan RENSTRA dalam periode 2021-2026. Penyusunan RENJA tahun 2024, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Bidang , Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja PD 2024 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan dapat memberikan hasil (Outcome) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RENJA 2024 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana lainnya, antara lain:

1. RENJA Tahun 2024 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2024 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias selatan Tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi,

3. sinergitas, harmonisasi antar pelaku Kegiatan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RENJA tahun 2024;
4. Setiap Bidang / Seksi wajib menyesuaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada Ranwal dan Rankhir RENJA Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
5. Dalam pelaksanaan RENJA tahun 2024, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam RENJA tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala Bidang:
 - (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta
 - (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
6. kewenangan sesuai dengan penjabaran tugas fungsi masing – masing;
7. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan di Bidang Industri dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja setiap program / kegiatan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024;
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun evaluasi rencana kerja (RENJA) berdasarkan hasil evaluasi Kepala Bidang, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024;

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 pada Organisasi Perangkat Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias

Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Keberhasilan pembangunan industri dan perdagangan, maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2024.

Telukdalam, 31 Juni 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nias selatan,

F. MARTIN LEY, SE.,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19750316 199803 1 007